

**IMPLIKASI PERUMUSAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT KASUS *BULLYING* DI
KALANGAN PELAJAR**

Yonna Diangrani Fandinia. Abdul Majid, SH.,MH. Milda Istiqomah, SH.,MTCP.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

Email: yonnadiangrani@yahoo.com

ABSTRACT

School was a place to get an education and science for a child. But, sometimes a child get a behavior violence of several their peers in the school or commonly called bullying as a form of reverences students against senior leader. An offender bullying who is also a child of course need to be given a guidance and not a punishment, moreover when the child of required to follow the judicial formal process due to he did. The emergence of act number 11 in 2012 on the juvenile justice system is an efforts of the government to protect the children by avoidance of formal effort. Diversion as an embodiment of restorative justice principle considered as a solution to evercome these relating to child. Diversion considered can be able to protecting the children against the negative stigma of society by the presence of a diverting from the formal process to the informal process. But, this diversion process was also included in the formal process criminal justice as investigation, prosecution, and the trial. It certainty will continue providing the negative stigma against the children moreover diversi should can be done without touching the justicial formal process.

Keywords: Child, Restorative Justice, Diversion, Bullying

ABSTRAK

Sekolah merupakan tempat untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu bagi seorang anak. Namun, terkadang seorang anak mendapatkan perilaku kekerasan dari

beberapa teman sebaya mereka di lingkungan sekolah atau biasa disebut upaya *bullying* yang dianggap sebagai bentuk penghormatan pelajar terhadap seniornya. Pelaku *bullying* yang juga seorang anak tentunya perlu diberikan sebuah bimbingan dan bukan sebuah hukuman apalagi bila anak diharuskan untuk mengikuti proses peradilan formal akibat perbuatan yang dilakukannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA ini merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk melindungi anak dengan cara penghindaran dari upaya formal. Upaya diversi sebagai perwujudan dari prinsip *restorative justice* dianggap sebagai sebuah solusi untuk mengatasi perkara yang terkait dengan anak. Diversi dianggap dapat melindungi anak terhadap stigma negatif dari masyarakat dengan adanya pengalihan dari proses formal ke proses informal. Namun, upaya diversi ini ternyata juga dimasukkan dalam proses formal peradilan pidana seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tentunya hal ini akan tetap memberikan stigma negatif terhadap anak apalagi seharusnya diversi dapat dilakukan tanpa menyentuh proses peradilan formal.

Kata Kunci: Anak, *Restorative Justice*, Diversi, *Bullying*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang amat penting bagi setiap orang di negeri ini. Adanya pendidikan yang baik tentunya akan mencerdaskan seseorang agar bisa menjadi penerus bangsa untuk membuat negeri ini lebih baik. Namun, ada kalanya kita hanya berpikiran dan menstandarkan bahwa apabila seseorang berpendidikan baik maka segala hal darinya tentulah baik. Saat ini hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur perilaku seseorang, kecerdasan tidak akan digunakan sebagaimana mestinya apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan moral dan bimbingan spiritual dari orang tua dan pendidik. Untuk itu masih banyaknya perilaku kekerasan baik kekerasan yang bersifat fisik ataupun mental yang terjadi di lingkup pendidikan atau yang biasa disebut dengan "*bullying*". *Bullying* bisa dilakukan oleh guru, senior kepada junior, ataupun teman sebaya. Hal ini membuktikan bahwa dalam lingkup

pendidikan baiknya tidak hanya menomorsatukan kecerdasan dan ilmu pengetahuan saja tetapi juga harus terdapat kontrol terhadap perilaku manusia.

Fenomena kekerasan terhadap seseorang yang terjadi dewasa ini makin mengalami peningkatan. Di Indonesia juga sempat digemparkan dengan adanya berita bahwa beberapa waktu yang lalu terdapat kasus kekerasan pada anak dapat yang salah satunya juga dapat terjadi di lingkungan sekolah seperti yang terjadi di SMA Don Bosco Pondok Indah Jakarta yang menyebabkan beberapa anak mengalami luka-luka. Mereka mengalami kekerasan oleh senior pada saat MOS berlangsung¹. Pelaku *bullying* di SMA Don Bosco tersebut menyatakan bahwa mereka melakukan penganiayaan karena status mereka sebagai senior. mereka juga merasa tindakannya terhadap beberapa juniornya tersebut masih wajar.²

Kekerasan tentu memiliki dampak terhadap korbannya. Seseorang yang menjadi korban kekerasan tentu akan mendapatkan rasa traumatik dan akan memengaruhi kehidupan di masa mendatang apalagi bila itu adalah seorang anak. Hal itu tentu akan cenderung membuat korbannya pendiam dan menutup diri dari lingkungan karena malu akan keadaannya. Namun, tidak hanya korban yang mendapatkan efek negatif dari perlakuan kekerasan. Pelaku yang seorang anak pun tentu akan mendapatkan beban baik secara psikologis maupun sosial ketika telah mendapatkan cap menjadi pelaku kekerasan.

Keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap anak ini tampaknya mulai mendapat dukungan dari pemerintah yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menerapkan sebagaimana diamanatkan dalam *Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ)* atau yang yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rule*, bahwa

¹ KPAI: Tak Ada Toleransi Bagi Kekerasan Anak <http://kpai.go.id/> diakses pada tanggal 14 Januari 2013

² Senioritas, Alasan Pelaku *Bullying* SMA Don Bosco <http://megapolitan.kompas.com/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2013

dipandang penting adanya jaminan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah dan kejahatan yang melibatkan anak, dengan tidak mengambil jalan formal, seperti menghentikan atau tidak meneruskan melalui proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat atau orang tua dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan kebijaksanaan tersebut ditegaskan dalam *Rule* 11.1 dan 11.2 SMR-JJ atau *The Beijing Rule* di bawah judul *Diversion*³. Konsep mengenai *restorative justice* dalam Undang-Undang SPPA sendiri diatur dalam pasal 1 ayat (6) dan pasal 5 bahwa dalam SPPA wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative atau *restorative justice*.

B. RUMUSAN MASALAH

- A. Apakah bentuk upaya penyelesaian yang dirumuskan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
- B. Apakah implikasi dari proses diversifikasi berdasarkan prinsip *restorative justice* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak sebagai pelaku *bullying*?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan krisis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.⁴

³ Kusno Adi, **Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM Press, Malang, 2009 hal 117

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 34

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau menelusuri suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶ Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu pula maka akan dibuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.⁷

Selain itu juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.⁸

3. Bahan Hukum

Pada penelitian ini akan digunakan buku-buku yang relevan ataupun pendapat para ahli serta peraturan perundangan seperti UUD Negara Republik 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 93

⁶ *Ibid*

⁷ Mukti Fajar, *Op.cit* hal 186

⁸ *Ibid* hal 190

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Merupakan sebuah cara untuk mendapatkan data penelitian yang akan dijadikan bahan untuk memecahkan masalah dalam penelitian yang ditulis. Pada penulisan hukum normatif akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan analisis peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis dekriptif. Metode analisis tersebut dipergunakan untuk menganalisis buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, maupun makalah yang berkaitan dengan prinsip *restorative justice*. Dalam penelitian hukum normatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.⁹

D. PEMBAHASAN

A. Bentuk Upaya Penyelesaian Yang Dirumuskan Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

A.1 Terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2012 yang kemudian pemberlakuannya dimulai 2 (dua) tahun sejak diundangkan atau

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 166

pada tahun 2014 ini. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Pemerintah membuat undang-undang ini karena dirasa undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.¹⁰

Terdapat perkembangan dalam UU SPPA ini yaitu dengan masuknya prinsip keadilan restoratif yang tidak berorientasi pada pembalasan atau sanksi kepada seorang anak saja namun lebih kepada memberikan sanksi yang bersifat pemulihan kepada anak sehingga hal ini akan lebih efektif untuk menimbulkan efek jera kepada si anak. Prinsip ini mendorong keterlibatan dari semua pihak untuk saling duduk bersama membahas mengenai penyelesaian perkara yang melibatkan anak. Anak dilihat bukan sebagai seorang “pelaku” tetapi tetap dilihat sebagai seorang “anak” yang masih membutuhkan bimbingan dan pendampingan serta wajib dilindungi hak-haknya. Anak diharapkan setelah menjalani proses penyelesaian perkaranya tidak mendapatkan stigmatisasi oleh masyarakat sebagai pelaku kejahatan sehingga si anak tersebut dapat kembali ke lingkungannya tanpa merasakan adanya tekanan dari orang-orang di sekitarnya dan anak dapat menempuh pendidikannya lagi seperti sediakala. Undang-undang ini mengutamakan tentang kepentingan terbaik bagi anak agar kehidupannya seperti anak pada umumnya.

Seorang anak yang melakukan suatu perbuatan yang disebut kejahatan tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena pada masa ini seorang anak tidak murni dari dirinya sendiri untuk

¹⁰ *Konsideran Menimbang*, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

memilih suatu perbuatan itu benar atau salah. Dalam masa itu anak dapat dipengaruhi oleh berbagai hal karena saat itu merupakan masa perkembangan sehingga ia masih dalam masa pencarian jati diri sehingga si anak menjadi mudah untuk terpengaruh dari lingkungan terdekatnya khususnya adalah teman-teman sepergaulannya.

Anak yang dalam hal ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum tentunya harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pelaku yang seorang dewasa karena anak tentunya memiliki keadaan psikologis yang berbeda dengan orang dewasa ketika menghadapi suatu permasalahan. Selain itu dalam undang-undang ini juga disebutkan mengenai tempat-tempat atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan proses peradilan pidana anak seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan tempat anak ketika menjalani masa pidananya, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang merupakan tempat sementara untuk anak ketika proses peradilan pidana berlangsung, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang merupakan tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Diharapkan dengan adanya lembaga-lembaga ini anak tidak terlalu merasa tertekan akibat adanya proses pidana yang menimpa dirinya.

UU SPPA ini mengatur mengenai penyelesaian perkara anak dengan menggunakan metode diversi yang wajib dilakukan disetiap tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak. Dalam UU sebelumnya yaitu UU Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan mengenai anak nakal, namun dalam UU SPPA hanya disebutkan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum sehingga akan meminimalisir perasaan anak karena tekanan.

Proses diversi ini pada dasarnya dilakukan untuk melindungi hak-hak anak. Diharapkan si pelaku anak dapat

bertanggungjawab atas perbuatannya dan pihak korban mau untuk menerima pertanggungjawaban dari pihak pelaku serta berusaha mengerti terhadap apa saja penyebab pelaku melakukan perbuatan tersebut. Hasil akhir perdamaian sangat diharapkan demi tumbuh kembang optimal terhadap anak. Dengan kata lain, tetap pihak pelaku diberikan teguran ataupun sanksi lain yang bersifat mendidik serta member pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukannya menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

UU SPPA juga mengatur mengenai batas usia anak yang yang dapat dipertanggungjawabkan adalah anak usia 12 tahun. Selain itu UU SPPA ini juga mengatur mengenai tata cara dan jangka waktu penangkapan, penahanan, dan klasifikasi pemidanaan yang berbeda dengan orang dewasa.

A.2 Bentuk Upaya Penyelesaian Perkara Anak Dalam Undang-Undang SPPA

Undang-Undang SPPA dalam pasal 6 menentukan bahwa proses penyelesaian perkara anak dilakukan dengan upaya diversifikasi yang memiliki berbagai tujuan yang berfungsi untuk melindungi hak-hak anak yaitu:

Pasal 6 UU SPPA:

Diversifikasi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam hal ini diversifikasi wajib dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak. Diversifikasi dilakukan dengan melakukan musyawarah antara anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan,

dan pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restoratif yang tercantum dalam pasal 8 ayat (1) UU SPPA.

Kesepakatan mengenai diversi yang dilakukan sesuai dengan pasal 11 UU SPPA dapat berbentuk:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Apabila kesepakatan ini disetujui bersama maka penyidik akan membuat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Namun, apabila tidak ditemui kesepakatan antara para pihak maka akan ditempuh proses peradilan pidana.

Upaya diversi ini dianggap lebih melindungi hak-hak anak serta dapat memberikan manfaat karena:

1. Anak dapat tidak ditahan dengan jaminan dari orang tua sehingga anak dapat tetap tinggal di rumah bersama orang tuanya ketika proses penyelesaian perkara sedang dilaksanakan;
2. Anak tidak mendapatkan stigma dari masyarakat karena anak tetap tinggal bersama orang tuanya dan terhindar dari proses formal sistem peradilan pidana;
3. Anak dapat diberikan bimbingan bahwa perbuatannya adalah keliru dan dapat diberikan pendidikan mengenai berperilaku yang baik;
4. Mengajarkan mengenai tanggung jawab kepada anak dan sikap berani mengakui perbuatannya;

5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih memiliki kepedulian khususnya kepada generasi muda agar mengambil hikmah atas peristiwa yang telah terjadi;
6. Memberikan kesempatan kepada korban untuk lebih didengar hak dan kemauannya akibat peristiwa yang seharusnya tidak diterimanya apalagi di usia-usia anak.

Pada kasus *bullying* di SMA Don Bosco Jakarta telah diterapkan proses diversi dengan mengadakan mediasi antara pelaku, korban, orang tua korban/pelaku, serta pihak lain yang secara tidak langsung terlibat dalam kasus tersebut untuk menyelesaikan dengan melihat kepentingan kedua belah pihak. Praktek ini bahkan sudah dilakukan sebelum berlakunya UU SPPA yang masih akan berlaku pada tahun 2014 ini. Pada kasus ini proses diversi telah diterapkan dengan mengadakan mediasi oleh pihak yang terkait namun untuk pelaksanaan praktek diversi seperti pada UU SPPA masih belum diterapkan karena pada saat itu aparat penegak hukum masih menginginkan adanya perdamaian antara keduanya mengingat kedua belah pihak masih berusia anak-anak.

Mekanisme diversi dalam kasus Don Bosco ini telah diterima oleh pihak korban. Orang tua korban menerima permintaan maaf dari pihak pelaku dengan perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hal ini merupakan suatu awal bentuk penerimaan proses baru serta adanya kepercayaan masyarakat terhadap bentuk penyelesaian perkara yang melibatkan anak sehingga tidak selalu berasaskan bahwa bentuk hukuman adalah suatu pembalasan. Namun, hukuman juga dapat berbentuk suatu hal yang dapat membangun seorang anak yang melakukan kesalahan untuk belajar lebih baik lagi.

B. Implikasi Dari Proses Diversi Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku *Bullying*

Proses diversi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tergolong baru karena hukum pidana yang lebih memberikan sebuah hukuman dan pembalasan dan bukan seperti prinsip diversi yang dalam undang-undang ini lebih mengarah pada perdamaian antara kedua pihak pelaku dan korban.

Diversi adalah sebuah upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹¹ Dalam kasus kejahatan maupun pelanggaran yang melibatkan seorang anak, pihak kepolisian dalam hal ini yang menangani kasus pidana tentunya akan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap seorang anak yang menjadi pelaku dari kejahatan atau pelanggaran tersebut. Anak yang masih belum memiliki kematangan secara psikologis tentunya belum mampu membedakan sesuatu hal adalah perbuatan yang baik ataupun buruk. Dalam hal ini keadaan psikologis serta emosional anak tentunya dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri anak maupun dari luar diri anak tersebut baik dari lingkungan keluarga, teman, sekolah, maupun tempat bergaulnya anak tersebut.

Ketika seorang anak melakukan suatu perbuatan yang melanggar ataupun merupakan suatu kejahatan, tentunya anak tidak bisa diberikan hukuman yang bersifat membalas dari perbuatan si pelaku anak dengan alasan karena keadaan psikologis anak yang belum memadai. Anak bisa diberikan hukuman yang lebih berupa mendidik anak tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya serta diberikan pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah keliru.

Selain itu anak yang telah diberikan hukuman tentunya akan merasakan bahwa ia telah diberikan cap atau stigma bahwa ia adalah seorang penjahat yang akan berakibat pada keadaan mental

¹¹ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dan psikologis si anak karena masih dalam tahap berkembang dan menemukan jati diri. Untuk itu saat ini pemerintah telah menerbitkan undang-undang yang menjelaskan tentang upaya penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara diversi. Diversi ini dilakukan untuk menjauhkan anak dari sistem peradilan formal dan pengaruh negatif dari sistem peradilan¹². Prinsip ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijabarkan sebagai berikut¹³:

- a. Tujuan: ide diversi untuk menghindari efek negative (stigma) akibat peradilan formal, kesejahteraan anak, penyelesaian konflik secara damai, dan pembinaan anak, menghindari pengulangan tindak pidana;
- b. Syarat-syarat ide diversi: harus ada kesepakatan/damai antara pelaku dan korban, serta masyarakat; orang tua dan anak setuju dan menyanggupi akan program diversi, dan menunjukkan rasa tanggung jawab anak, biasanya kejahatan yang dilakukan kejahatan yang tidak berat;
- c. Metode ide diversi: dalam bentuk peringatan, pembayaran denda/ganti rugi, pembinaan keterampilan, pembinaan oleh orang tua, konseling.

Proses diversi sendiri dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki sanksi atau pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁴ Bentuk program diversi antara lain yaitu pelaksanaan kontrol secara sosial, pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku,

¹² Hasil wawancara dengan Bripda Irfan P.P, selaku Reskrim Unit PPA Polres Kediri Kota, 7 November 2013, diolah 2013

¹³ Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 95

¹⁴ Pasal 7 ayat (2) huruf a,b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menuju proses *restorative justice*.¹⁵ Lebih lanjut pelaksanaannya adalah sebagai berikut:¹⁶

- Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan, pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua bagi pelaku oleh masyarakat.
- Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Upaya diversifikasi ini dilakukan dengan melakukan musyawarah dengan melibatkan si anak dan orang tuanya serta korban dan orang tuanya atau pihak lain yang dianggap perlu atau berkepentingan untuk mendukung proses berjalannya diversifikasi ini. Proses ini memerlukan kepedulian tidak hanya pada kepentingan korban, namun juga kepentingan si anak sebagai pelaku dan pada akhirnya untuk melindungi anak dari stigmatisasi dengan label jahat pada anak. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif demi perkembangan si anak.

¹⁵ Marlina, **Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak**. Equality, Volume 13 No. 1 Februari 2008 hal 3

¹⁶ Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak <http://doktermarlina.wordpress.com/> diakses pada 22 November 2013

Makna diversi sendiri dalam komentar *Rule 11.1 The Beijing Rules* atau SMRJJ sebagai berikut:

Rule Diversion, involving removal from criminal justice processing and, frequently rediscrction to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non-intervention would be the best response. Thus, diversion at the outset snd without referral to alternative (social) services may be optimal response. This is specially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner.

Yang memiliki arti¹⁷:

Diversi menyangkut pengalihan dari proses peradilan pidana dan seringkali diarahkan ke layanan dukungan masyarakat, umumnya dilakukan secara formal dan informal dalam sistem hukum. Praktek ini berfungsi untuk mencegah efek negatif dari proses berikutnya dalam administrasi peradilan anak (misalnya stigma dari putusan dan hukuman). Di banyak kasus, non-intervensi akan menjadi respon terbaik. Dengan demikian, diversi pada permulaan dan tanpa rujukan ke alternatif (sosial) layanan mungkin respon yang optimal. Hal ini terutama terjadi dimana pelanggaran bersifat tidak serius dan dimana keluarga, sekolah atau lembaga kontrol sosial informal lainnya telah bereaksi, atau cenderung bereaksi dengan cara yang tepat dan konstruktif.

¹⁷ M. Aenur Rosyid dkk, **Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing** (Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana ANak, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal 12

Penerapan diversifikasi menurut SMRJJ atau *The Beijing Rules* dalam komentar Rule 11.1 dapat dikatakan bahwa merupakan suatu cara untuk menghilangkan tahapan proses peradilan formal yang biasa dilakukan untuk seseorang yang berbuat kejahatan atau pelanggaran dan kemudian menggantinya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan, dimana program ini sudah diterapkan baik secara formal maupun informal.¹⁸ Para pelaku anak diberikan hukuman yang tidak bersifat pembalasan namun dengan hukuman yang bersifat mendidik dan dilakukan pembinaan atau resosialisasi agar anak dapat diterima oleh lingkungannya.

Dapat dikatakan proses diversifikasi adalah pengalihan dari proses formal ke proses informal atau dengan kata lain adalah penyelesaian dilakukan diluar jalur yang semestinya dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si anak. Diversifikasi seharusnya dilakukan sebelum menginjak proses-proses formal yang ada seperti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap anak. Sebelum pada tahap formal tersebut baiknya pihak kepolisian melaksanakan upaya diversifikasi terhadap pelaku dan memberikan upaya penyelesaian pertama dengan berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta memberikan pengertian mengenai dijunjungnya hak-hak seorang anak sehingga upaya diversifikasi inilah yang kiranya dapat menjadi upaya penyelesaian tanpa menggunakan upaya-upaya formal lainnya yang semestinya tetap memberikan efek dan stigma negatif terhadap pelaku anak. Padahal, dalam UU SPPA diwajibkan melaksanakan proses diversifikasi di setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak.

Bila dikaitkan dengan definisi diversifikasi dalam instrument internasional anak maka terdapat pemahaman yang berbeda dalam memahami diversifikasi. Diversifikasi dalam UU SPPA dimaknai sebagai

¹⁸ Setya Wahyudi, *Op.cit* hal 275-276

proses pengalihan yang bisa dilaksanakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak. Sementara diversi dalam *The Beijing Rules* dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana yang memberikan stigma negatif bagi anak. Dalam komentar 11. 1 *Beijing Rules* juga ditegaskan bahwa diversi dimaksudkan untuk menghindari stigma negatif selama anak diproses dalam system peradilan anak. Diversi harus dilakukan pada saat anak yang berkonflik dengan hukum melakukan kontak pertama dengan penyidik. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan khusus bagi penyidik agar mampu menjalankan program diversi dengan baik.¹⁹

Praktek mengenai diversi dengan pendekatan keadilan restoratif terkendala dengan masih belum banyak masyarakat yang mengenalnya serta kebanyakan korban dan/atau keluarga korban yang masih menginginkan hukuman yang bersifat retributif terhadap pelaku sebagai efek jera. Padahal diperlukan pemikiran panjang untuk menghukum seorang anak agar tidak berpengaruh terhadap keadaan psikologisnya serta kemungkinan-kemungkinan akan anak yang mungkin menjadi seseorang seperti stigma yang diberikan kepadanya.

Diversi sebagai wujud dari penerapan prinsip *restorative justice* dianggap sebagai sebuah kemajuan dalam upaya melindungi hak-hak anak. *Restorative justice* sendiri merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan antara pelaku, korban dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang ada tanpa hanya terpancang pada kesalahan pelaku namun juga memberikan suatu usaha untuk mengembalikan perilaku baik pelaku. Pemikiran lama yang hanya melihat kesalahan dari pelaku perlu diubah dengan menghindarkannya dari upaya formal untuk menghindari stigma negatif dan berusaha mencari solusi dengan musyawarah ataupun diskusi dengan melihat kepentingan masing-masing

¹⁹ Muhammad Aenur Rosyid dkk. *Op.cit*, hal 13

korban. Upaya diversi dalam UU SPPA ini dianggap sebuah mekanisme yang dapat mewujudkan prinsip *restorative justice* karena dalam setiap tahap penyelesaian perkara diwajibkan untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Penerapan mengenai diversi hendaknya dapat dilakukan mulai dari sekarang meskipun UU SPPA belum berlaku selain karena aparat penegak hukum bisa melakukan diskresi untuk melakukan diversi, seorang pelaku anak juga bisa terhindarkan dari proses pidana dan sedapat mungkin tidak dipidana dan hanya dikenai tindakan saja sebagai upaya perlindungan terhadapnya. Sehingga seorang anak tidak akan mendapatkan implikasi buruk akibat perlakuan terhadapnya.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk dari upaya penyelesaian yang dirumuskan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistema Peradilan Pidana Anak adalah Proses Diversi. Sistem Diversi adalah pengalihan dari proses formal ke proses informal atau dengan kata lain adalah penyelesaian dilakukan diluar jalur yang semestinya dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si anak.
2. Proses Diversi menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan pada setiap proses peradilan. dalam UU SPPA dijelaskan bahwa proses diversi telah menerapkan prinsip *restorative justice* yaitu dengan menghindarkan anak dari proses peradilan formal untuk menghindari stigma negatif terhadap anak oleh masyarakat. Selain itu diwajibkan pula keterlibatan langsung dari masyarakat untuk ikut menyelesaikan dan mengawasi anak untuk tujuan resosialisasi anak terhadap lingkungannya.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan mengkaji ulang UU SPPA tentang penerapan prinsip diversi yang berkaitan dengan anak sehingga dilakukan penyelesaian diluar proses formal untuk melindungi hak-hak anak.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang belum begitu mengenal proses diversi sehingga masih memiliki pandangan bahwa hukuman itu sebagai pembalasan kepada pelaku anak maka harus diberi pemahaman mengenai pentingnya melindungi hak-hak anak dengan cara menghindarkan dari proses formal dengan tetap melibatkan masyarakat untuk ikut mengawasi.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Kusno Adi, **Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM Press, Malang, 2009

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Jurnal

Marlina, **Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak**. Equality, Volume 13 No. 1 Februari 2008

Makalah

M. Aenur Rosyid dkk, **Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui *Family Group Conferencing* (Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Internet

KPAI: Tak Ada Toleransi Bagi Kekerasan Anak <http://kpai.go.id/> diakses pada tanggal 14 Januari 2013 Senioritas, Alasan Pelaku *Bullying* SMA Don Bosco <http://megapolitan.kompas.com/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2013

Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak <http://doktermarlina.wordpress.com/> diakses pada 22 November 2013